

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006 sampai tahun 2015 cenderung mengalami penurunan dengan persentase rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 12.079 %.
- 2) Perkembangan dana alokasi umum di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2006 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana rata-rata dana alokasi umum adalah sebesar Rp. 497.648.796.900,00.
- 3) Perkembangan dana alokasi khusus di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2006 sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata dana alokasi khusus sebesar Rp. 70.772.634.000,00.
- 4) Perkembangan dana bagi hasil di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2006 sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata dana alokasi khusus sebesar Rp. 18.204.849.810,00.
- 5) Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dimana kenaikan 1 % dana alokasi umum akan menurunkan kemiskinan sebesar 3,349%.

- 6) Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.
- 7) Dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dimana 1 % kenaikan dana bagi hasil akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,605%.

6.2. Saran

- 1) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hendaknya memprioritaskan penggunaan DAU dan DBH untuk program pemberdayaan masyarakat karena semakin tinggi DAU dan DBH yang diterima pemerintah daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan.
- 2) Pemerintah daerah hendaknya menyadari bahwa desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat sehingga akses dalam mendapatkan pelayanan dasar semakin luas. Maka pemerintah daerah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat untuk menyediakan kebutuhan pelayanan dasar tersebut.
- 3) Perlu adanya pengawasan yang lebih teliti dari pemerintah pusat terhadap berlangsungnya desentralisasi fiskal. Sehingga dengan pengawasan tersebut proses pembangunan di daerah menjadi lebih terjamin dan terhindar dari penyimpangan, kemudian pada akhirnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan.
- 4) Hendaknya dengan adanya desentralisasi fiskal, mampu menjadikan daerah Kab. Padang Pariaman menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat.

- 5) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti bagaimana pengaruh belanja pegawai terhadap keiskinan di Kabupten Padang Pariaman serta bagaimana DAK dapat meningkatkan kemiskinan di Kab. Padang Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Arham, Muhammad (2013)., **Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Tengah**. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 Universitas Padjadjaran.
- Arsyad, Lincoln (2010)., **Ekonomi Pembangunan**. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Bratakusumah Deddy Supriady dan Solihin Dadang (2001)., **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Embri (2015)., **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat**. Skripsi Fakultas Ilmu Ekonomi. Padang.
- Fibriani, Fini (2017)., **Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2013**. Skripsi Fakultas Ekonomi Unand. Padang.
- Gujarati, Damodar (2012)., **Dasar-Dasar Ekonometrika**. Salemba Empat. Jakarta.
- HAW, Wijaya (2007)., **Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia**. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hakim, Abdul (2014)., **Peran Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Propinsi Bali**. Jurnal Aplikasi Bisnis Vol 16. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (2003)., **Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang**. Erlangga. Jakarta.
- Kusaini, Mohammad (2006)., **Ekonomi Publik – Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah**. BPFE Unibraw. Malang.
- Madiasmo (2009)., **Akuntansi Sektor Publik**. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno (1993)., **Ekonomi Publik**. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Nanga, M. (2006)., **Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia : Suatu Analisis Simulasi Kebijakan**. Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Nyoman Ayu Sudewi, Ni (2013)., **Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Propinsi Bali**. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.2 Universitas Udayana. Denpasar.

Santoso, Singgih (2012)., **Aplikasi SPSS Pada Statistik Multivariat**. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Sidik, Machfud (2002)., **Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional**. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan. Jakarta.

Sidik, Machfud (2004)., **Indonesia's Imbalance Decentralization and Its Future Direction for A Greater Taxing Power to Sub-National Governments**. Dalam Subiyantoro dan Rihpat (Eds) Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. edisi Revisi. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Suliyanto (2011)., **Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi Dengan SPSS**. Andi. Yogyakarta.

Suryawati, Chriswardani (2005)., **Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional**. JMPK.

Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2011) **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Edisi Kesebelas. Erlangga. Jakarta.

Umar, Darwis (2012)., **Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Takalar Periode Tahun 2000-2010**. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Unhas. Makassar.

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wauran, Patrick, Meilen Greri Paseki, dan Amran Naukoko (2014)., **Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012**. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.14 No.3 Oktober.

Yulhendri (2009)., **Pembangunan Ekonomi: Pasar, Struktur Ekonomi, Pendidikan Dan Pengurangan Kemiskinan**. UNP Press. Padang.

www.bpspadangpariaman.go.id diakses pada 2 Desember 2016.

www.padangpariamankab.go.id diakses pada 6 Januari 2017.

www.worldbank.org diakses pada 6 Januari 2017.

www.bpssumbar.go.id diakses pada 25 Februari 2017.

www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 25 Februari 2017.

www.kompas.com diakses pada 25 Mei 2017.

www.menpan.go.id

www.katadata.co.id